

# **BAB I**

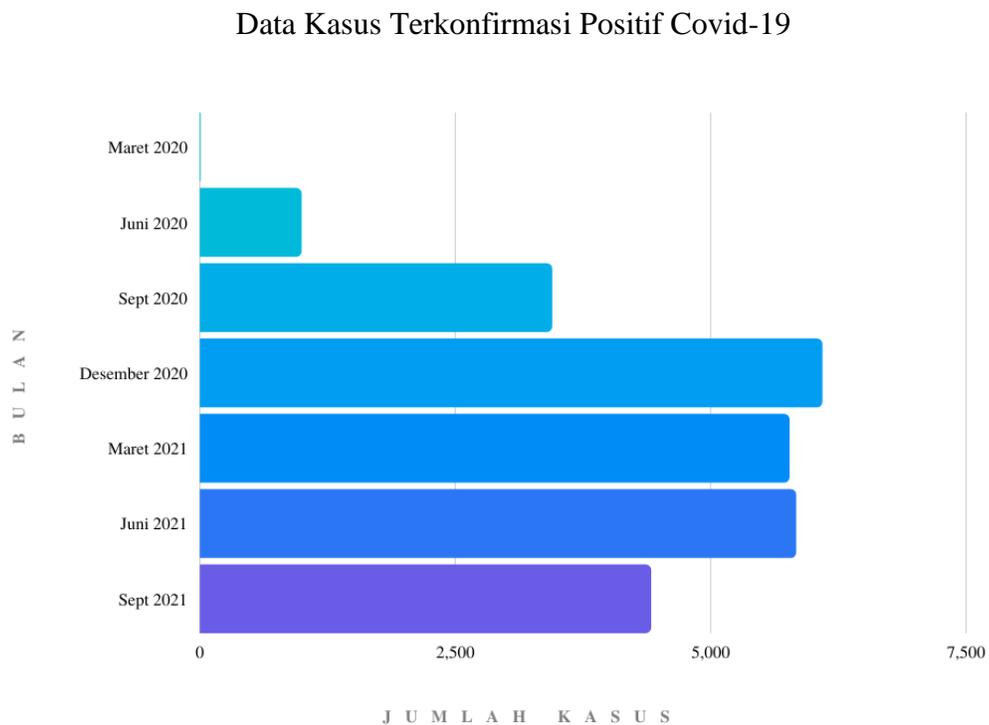
## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Coronavirus adalah suatu kelompok virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan atau manusia. Covid-19 atau virus corona adalah penyakit yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang baru ditemukan. Wabah ini pertama kali ditemukan di Wuhan, Tiongkok, pada bulan Desember 2019 dan sekarang menjadi sebuah pandemi yang sedang terjadi di seluruh dunia. Pada tanggal 2 Maret 2020, kasus positif Covid-19 pertama kali dideteksi di Indonesia ketika dua orang terkonfirmasi tertular dari seorang warga negara Jepang (Ihsanuddin, 2020).

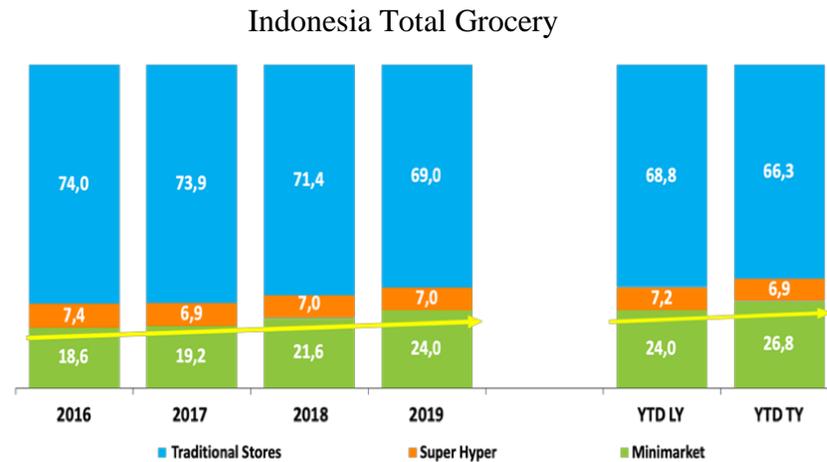
Dalam kurun waktu kurang dari 1 bulan, kasus positif Covid-19 meningkat pesat menjadi 893 orang pada 26 Maret 2020 (“Lonjakan Kasus Corona RI: Dari Dua Positif Hingga 893 Kasus,” 2020). Kasus terbaru per tanggal 8 Oktober 2021, pemerintah Indonesia melaporkan 4.225.871 orang terkonfirmasi positif Covid-19 dengan angka kematian sebesar 142.560 dan kesembuhan 4.057.760 orang dari penyakit ini. Hal ini membuat Indonesia berada di peringkat 14 dunia dan peringkat 1 di Asia Tenggara dengan total kasus positif terbanyak (*Worldometer*, 2021)

Hadirnya pandemi Covid-19 telah membawa perubahan terhadap dunia tidak hanya dari sisi kesehatan tetapi juga dari sisi perekonomian. Banyaknya kasus yang semakin bertambah setiap harinya membuat pemerintah berupaya dalam menghambat penyebaran dengan berbagai cara.

**Gambar 1.1.** Data Sebaran Covid-19

*Sumber:* Peta Sebaran Covid-19 2021

Sejak 1 April 2020, pemerintah menetapkan peraturan tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 dan terapkan di berbagai daerah Indonesia yang menjelaskan mengenai pembatasan sosial berskala besar pada wilayah atau daerah yang terdapat kasus positif terinfeksi Covid-19 seperti; sekolah, bekerja di kantor, keagamaan, fasilitas umum, sosial budaya, transportasi umum, dan pertahanan keamanan dengan masa inkubasi 14 hari dan pemberian sanksi bagi yang melanggar.

**Gambar 1.2.** Data UMKM Ritel Tradisional di Indonesia

Source: Nielsen Indonesia Retail Audit

Sumber: Nielsen Indonesia Retail Audit

Penerapan PSBB mengakibatkan dampak ekonomi yang cukup besar. Tidak hanya perusahaan besar, usaha usaha pada skala mikro, kecil dan menengah (UMKM) pun terpuak akibat adanya kebijakan penanganan Covid-19. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah UMKM di Indonesia mencapai 64 juta (Santia, 2020). Komposisi Usaha Mikro dan Kecil (UMK) sangat dominan yakni 99,92% dari total UMKM yang ada. Pemerintah perlu memberi perhatian khusus pada sektor UMKM karena sektor ini merupakan penyumbang terbesar terhadap PDB dan mampu diandalkan dalam penyerapan tenaga kerja, mensubstitusi produksi barang konsumsi dan setengah jadi. Berdasarkan hasil survei Katadata Insight Center (KIC) pada 206 pelaku UMKM di Jabodetabek, 82,9% UMKM merasakan dampak negatif dari pandemi ini. Selain itu, Kondisi pandemi bahkan menyebabkan 63,9% dari UMKM mengalami penurunan omzet lebih dari 30% (Bahtiar, 2021).

Pandemi Covid-19 menyebabkan guncangan serius bagi UMKM, baik dari sisi *supply* maupun *demand* (Natalia, 2021). Menurut Natasya dan Hardiningsih (2021), UMKM menghadapi empat permasalahan ekonomi yaitu penurunan penjualan akibat aturan PSBB, kesulitan permodalan karena perputaran modal yang sulit, hambatan distribusi produk, dan kesulitan bahan baku. Setidaknya 37 ribu UMKM di Indonesia mengalami penurunan kinerja akibat Covid-19, dengan dampak yang ditimbulkan adalah penurunan penjualan sebesar 56%, pendanaan sebesar 22%, distribusi barang sebesar 15%, dan akses bahan baku sebesar 4% (Rahman, 2020).

Hasil survei yang dilakukan oleh Asian Development Bank menyatakan 50 persen UMKM di Indonesia menutup usahanya pada Juli 2020. Asian Development Bank mencatat sebanyak 88 persen usaha mikro tidak memiliki kas atau tabungan sehingga tidak memiliki pembiayaan keuangan dan sekitar 60 persen usaha mikro mengurangi tenaga kerja (Librianty, 2021). Menurut data Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo), selama masa pandemi 2020 tercatat 30 jutaan UMKM yang jatuh dan akhirnya bangkrut sehingga mengakibatkan kontribusi UMKM pada Pendapatan Domestik Bruto (PDB) Indonesia menyusut. Padahal pada tahun 2019 UMKM berkontribusi pada negara sekitar 60% (Hendartyo, 2021).

Karena PSBB membatasi pergerakan orang dan barang serta mengharuskan untuk berdiam diri di rumah, maka para pelaku UMKM harus bisa beradaptasi dengan cara melakukan perubahan pada strategi bisnis untuk dapat mempertahankan usahanya di tengah pandemi ini. Salah satunya adalah dengan memanfaatkan teknologi dalam kegiatan jual beli. Menurut Arianto (2020), alternatif penyelamatan sekaligus pengembangan kewirausahaan di Indonesia pada masa pandemi Covid-19 adalah dengan UMKM digital. Namun, tidak semua UMKM dapat menerapkan strategi bisnis yang baru. kebanyakan UMKM di Indonesia masih memiliki masalah, baik secara internal maupun eksternal dalam mendigitalisasikan bisnisnya.

Pada masalah eksternal, terdapat keterbatasan dalam sarana dan prasarana untuk memasuki pasar, penggunaan teknologi yang minim, dan masih lemahnya jaringan usaha serta kemampuan penetrasian pasar. Selain itu masalah internal yang dihadapi yaitu kekurangan modal dan keterbatasan dalam akses modal menjadi suatu hambatan khususnya dalam situasi genting seperti sekarang. Beberapa isu kritis yang dihadapi oleh UMKM adalah terbatasnya dana dan kapabilitas teknologi informasi yang dimiliki. Hal ini dikarenakan ketidakpahaman pedagang dalam cara mengakses informasi mengenai cara pengembangan dan pemasaran bisnis via online sehingga kurang efektifnya strategi yang diterapkan (Khaeruddin *et al.*, 2020).

Dengan melakukan digitalisasi dalam penjualan, para pelaku UMKM juga menghadapi masalah baru dalam hal persaingan bisnis. Tidak semua UMKM dapat menerapkan strategi yang disarankan. Hal ini dikarenakan tidak semua bidang usaha memiliki pola kerja dan kemampuan keuangan yang sebanding. Maka dari itu diperlukan peran dan dukungan dari Pemerintah untuk menolong Usaha Mikro Kecil dan Menengah agar mampu bertahan dalam situasi pandemi Covid-19. Selain itu diperlukan juga upaya dan strategi lain agar UMKM dapat lebih berkembang dan beradaptasi dalam situasi pandemi Covid-19 ini (Santoso, 2020.).

Menurut lembaga riset keuangan CSLA, melalui riset E-warung Indonesia's new digital battleground (2019), menyatakan 65-70 persen total penjualan ritel tradisional di Indonesia dikontrol oleh warung dengan nilai rantai pasok produk ke ritel tradisional diperkirakan mencapai sedikitnya US\$58 miliar (sekitar Rp 817 triliun) per tahun. ("CLSA: Mitra Warung Bukalapak Jadi Pintu Inklusi Fintech," 2019). Hal ini membuat UMKM menarik untuk diteliti karena dominannya UMKM di Indonesia.

Salah satu daerah yang menarik untuk dibahas adalah UMKM yang terletak di Kecamatan Jambi Timur. Hal ini dikarenakan disini terdapat usaha makanan dan minuman yang bersifat unik dan kekinian serta terletak di pusat kuliner dan usaha kecil di Kota Jambi. Namun karena adanya pandemi Covid-19 mengharuskan para UMKM tutup akibat kebijakan pembatasan sosial. Melalui laporan data para UKM, banyak pedagang di Kota Jambi yang terkena dampak Covid. Dari pendataan yang dilakukan, meskipun baru sebagian, sudah ada 1.700 pedagang yang terkena dampak Covid-19. Sementara itu Ketua Pedagang Kaki Lima (PKL) Kota Jambi mengatakan 80% dari 5.000 PKL di Kota Jambi tidak dapat berjualan lagi sehingga para PKL harus menggunakan modal usaha mereka untuk kehidupan sehari-hari (Jannah, 2020).

Menurut Kepala Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UMKM Kota Jambi Komari, pendapatan pelaku UMKM menurun drastis. Selain itu, dalam upayanya UMKM di Kota Jambi diharapkan mulai memasuki pasar digital. Namun, menurut data dari 920 pelaku UMKM yang sehat, berkualitas, dan aktif, hanya 20% yang sudah memasuki pasar digital (Ahmadi, 2021).

Berdasarkan deskripsi latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian bagaimana dampak pandemi Covid-19 terhadap keberlanjutan UMKM dan strategi bertahannya dengan mengangkat judul **“Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Keberlanjutan Umkm dan Strategi Bertahannya” (Studi Kasus UMKM di Kecamatan Jambi Timur)**.

## 1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana dampak pandemi Covid-19 dari sisi bisnis operasional dan keuangan pada UMKM di Kecamatan Jambi Timur?
2. Bagaimana peran dan dukungan dari pemerintah untuk membantu UMKM di Kecamatan Jambi Timur agar tetap *survive* di masa pandemi Covid-19?
3. Bagaimana strategi dan arah transformasi bisnis dari UMKM di Kecamatan Jambi Timur agar mampu *survive* di masa pandemi Covid-19?

## 1.3. Tujuan Penelitian

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak pandemi Covid-19 terhadap bisnis UMKM di Kecamatan Jambi Timur dari sisi operasional dan keuangan
2. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran dan dukungan dari pemerintah dalam membantu UMKM di Kecamatan Jambi Timur pada kondisi Pandemi Covid-19
3. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi yang digunakan UMKM yang ada di Kecamatan Jambi Timur untuk survive di masa pandemi Covid-19

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak sebagai berikut:

1. Bagi pelaku usaha. Sebagai bahan masukan serta pengembangan terhadap strategi bertahan dalam menghadapi pandemi Covid-19.
2. Bagi Pemerintah. Mengetahui dampak pandemi Covid-19 terhadap UMKM sehingga dapat menjadi acuan untuk membantu pemilik UMKM dengan tepat sasaran.
3. Bagi peneliti. Menambah wawasan keilmuan dan pengetahuan yang berkaitan dengan dampak pandemi Covid-19 terhadap keberlanjutan UMKM dan strategi bertahan yang dapat digunakan sebagai informasi bagi peneliti selanjutnya